



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Terpadu No.... Telp / Fax. (0763) 33151
SELATPANJANG

KodePos 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 460 /DINSOSP3AP2KB/Kpts/XII/2024/1430

TENTANG

**PENILAIAN RISIKO PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Resiko pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu di atur dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penilaian Risiko Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.

KESATU : Data Penilaian Resiko pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Tanggal, 27 Desember 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sumber Data	Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesenjangan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 4. Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak		
IKU Renstra OPD	IKU		2025
	1	Persentase PPKS yang tertangani	93%
	2	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,16
	3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%
	4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	10,51%
	5	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesenjangan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 4. Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak IKU Strategis : 1. Persentase PPKS yang tertangani 2. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) 3. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu 4. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 5. Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu		
	Selatpanjang, 24 Desember 2024 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti  Dra. KAMISAH, M.Pd.I Pembina Tk.I / (IV.b) NIP. 19690219 199401 2 001		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti																								
Tahun Penilaian	2025																								
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026																								
Urusan Pemerintahan	1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																								
OPD yang Dinilai	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
Sumber Data	Renja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025																								
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak																								
Program Dinas SosialP3AP2KB (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	Program : 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 6. Program Perlindungan Perempuan 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 10. Program Perlindungan Khusus Anak 11. Program Pengendalian Penduduk 12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)																								
Keluaran/Hasil Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keluaran</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>30 Keluarga</td></tr> <tr> <td>Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>30 Keluarga</td></tr> <tr> <td>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>101 Orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan</td><td>9 Orang</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>1 Lembaga</td></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>400 Orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>290 Orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>120 Orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>10 Orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>50 Orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>20 Orang</td></tr> </tbody> </table>	Keluaran	Target	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	101 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	9 Orang	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Keluaran	Target																								
Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga																								
Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga																								
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	101 Orang																								
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	9 Orang																								
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga																								
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang																								
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang																								
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang																								
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang																								
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang																								
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang																								

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1700 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5.000 Orang
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10.000 Orang
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Keluarga
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	35 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Organisasi
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	50 Orang
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	15 Layanan
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	80 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	
Tahun Penilaian	2025	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Sumber Data	Renja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	
Program Dinas Sosial P3AP2KB (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	Program 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 6. Program Perlindungan Perempuan 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 10. Program Perlindungan Khusus Anak 11. Program Pengendalian Penduduk 12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Keluaran	Target
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	101 Orang
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	9 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1700 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5.000 Orang
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10.000 Orang
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Keluarga
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	35 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Organisasi
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	50 Orang
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	15 Layanan
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	80 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	30 Orang
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Layanan
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang
Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	9 Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan
Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18 Laporan
Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen
Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	303 Orang
Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	610 Orang
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	13 Laporan
Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50 Orang
Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 Kampung
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan
Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit
Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang
Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya	741 Orang

Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
		2 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
		3 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		4 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		5 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		6 Penyediaan Permakanan
		7 Penyediaan Sandang
		8 Penyediaan Alat Bantu
		9 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		10 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan
		11 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
		12 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		13 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		14 Pemberian Layanan Kedaruratan
		15 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		16 Pemberian Layanan Rujukan
		17 Penyediaan Permakanan
		18 Pemberian Layanan Rujukan
		19 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		20 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		21 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		22 Penyediaan Makanan
		23 Penyediaan Sandang
		24 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		25 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		27 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
		28 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		29 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		30 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		31 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		32 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		33 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		34 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		35 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		36 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

	37	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	38	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	39	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
	40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	43	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	44	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	45	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	46	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota
	47	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	48	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
	49	Pengendalian Program KKBPK
	50	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
	51	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	52	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
	53	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	54	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	55	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	56	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	57	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	58	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	59	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi)
	60	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	61	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	62	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
In dik ato r Ke lua	1	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

	4	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	6	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
	7	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
	8	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
	9	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	10	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	11	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota
	12	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
	13	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	14	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
	15	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	16	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
	17	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
	18	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
	19	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
	20	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
	21	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	22	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
	23	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
	24	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
	25	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	26	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	27	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
	28	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG
	29	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
	30	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

	31 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
	32 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
	33 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	34 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	35 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
	36 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	37 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
	38 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	39 Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	40 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
	41 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	42 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	43 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	44 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan
	45 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
	46 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK
	47 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	48 Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
	49 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK
	50 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
	51 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	52 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan
	53 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	54 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
	55 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	56 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	57 Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

		58 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
		59 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		60 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia
		61 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
		62 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan
		Selatpanjang, 24 Desember 2024 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  <u>Dra. KAMISAH, M.Pd.I</u> Pembina Tk.1 / (IV.b) NIP. 19690219 199401 2 001

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Penda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti								
Nama OPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
Tahun Penilaian	: 2024								
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026								
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesenjangan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak								
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
	Sasaran OPD : Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS								
	Program : Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Database terkait Jumlah KAT di Kepulauan Meranti belum seluruhnya Valid	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.01	Kepala Dinas	Terdapat Masyarakat KAT belum ditetapkan melalui SK Kementerian karena terbatasnya Informasi tentang sebaran Komunitas Adat Terpencil.	Internal	Masih banyak Masyarakat KAT yang belum mendapatkan layanan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Masyarakat KAT dan Dinas Sosial SosialP3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum maksimal	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.02	Kepala Dinas	- Kurang Koordinasi antara PSKS dan Dinas Sosial - Kurangnya Pembekalan terkait Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.	Internal	Pemberdayaan Sosial yang di berikan kepada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi tidak Optimal	Masyarakat dan Dinas Sosial SosialP3AP2KB
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Belum Validnya data PMKS yang ada	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.03	Kepala Dinas	Tidak adanya Pemutakhiran data PMKS yang di lakukan	Internal	Adanya PMKS yang seharusnya menerima layanan Rehabilitasi Sosial menjadi tidak menerima karena belum terdata	Masyarakat dan Dinas Sosial SosialP3AP2KB
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial masih ada yang tidak tepat sasaran	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.04	Kepala Dinas	Verifikasi Usulan dari Desa terkait KPM yang dimasukkan kedalam DTKS sebagai penerima bantuan dan jaminan sosial dari Pemerintah masih by Sistem dan belum turun langsung kelapangan	Internal	Masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan	Masyarakat Miskin dan Dinas SosialP3AP2KB
	Program : Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.05	Kepala Dinas	- Tidak adanya Kendaraan layanan Kedaruratan guna mengangkut bantuan logistik yang di miliki - Terlambatnya laporan tentang Kejadian Bencana yang masuk	Internal dan Eksternal	Pelayanan terhadap Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mengalami Keterlambatan	Korban Bencana dan Dinas SosialP3AP2KB
			Jumlah Korban Bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan tidak bisa di prediksi	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.06	Kepala Dinas	Belum adanya mapping data daerah rawan bencana alam dan sosial	Internal	Pengaduan kejadian bencana yang masuk melebihi target yang telah di tetapkan di dalam rencana kerja	Korban Bencana dan Dinas SosialP3AP2KB
	Sasaran OPD : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Program : Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen GDPK yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.07	Kepala Dinas	Minimnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan Dokumen GDPK	Internal	Terlambatnya pemanfaatan GDPK yang mestinya di gunakan dalam pengambilan Kebijakan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Stakeholder terkait
	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Tidak semua Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut Ber-KB	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.08	Kepala Dinas	Masih kentalnya budaya di masyarakat setempat yang sehingga adanya perbedaan pandangan di masyarakat terkait penggunaan Alat Kontrasepsi	Eksternal	Pengendalian Penduduk menjadi tidak terkendali	Dinas SosialP3AP2KB dan Masyarakat Pasangan usia Subur (PUS)
	Program : Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Kurangnya minat keluarga sasaran untuk menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.09	Kepala Dinas	Kualitas penyuluhan oleh kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL) belum sesuai standar	Internal	Pemahaman tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk individu yang sehat, harmonis dan dan berkualitas menjadi tidak tersampaikan kepada masyarakat	Dinas SosialP3AP2KB dan Masyarakat
2	Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Gender								
	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Kurangnya pemahaman dan dukungan dari pada Stake Holder dalam pelaksanaan PUG	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.10	Kepala Dinas	Belum adanya Kebijakan terkait pelaksanaan PUG pada lembaga pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal	Rendanya Penilaian APE dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	1. Pemerintah Daerah 2. Dinas SosialP3AP2KB
	Program : Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Minimnya Laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.11	Kepala Dinas	1. Ketidakhahaman masyarakat terkait jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan kasus yang terjadi di keluarga	Eksternal	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara Optimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan Korban Kekerasan
	Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup	Rendahnya pengetahuan peran dan tanggungjawab ibu rumah tangga dalam membina keluarga yang harmonis dan sejahtera	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.12	Kepala Dinas	Kurangnya Sosialisasi dan pengetahuan tentang perempuan dalam rumah tangga	Internal	Rendahnya target capaian Indeks Kualitas Keluarga	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan
3	Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak								
	Sasaran : Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak								
	Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Tidak tersedianya data Gender dan Anak yang terpilah	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.13	Kepala Dinas	Pihak Penyedia yang tidak Kompeten di bidangnya dalam melakukan Analisis Data	Eksternal	Kualitas data yang di sediakan tidak sesuai Standar	1. Dinas SosialP3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Program : Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Masih sedikit forum anak yang Aktif	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.14	Kepala Dinas	Terbatasnya Sosialisasi pembentukan forum anak maupun pembinaan terhadap forum anak secara simultan	Internal	Kurang Maksimalnya pemenuhan hak anak di tingkat desa/kelurahan	1. Pemda 2. Dinas SosialP3AP2KB 3. Anak
	Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrehensif	Minimnya Laporan Tindak Kekerasan terhadap Anak	RSO.1.06.2.0 8.2.14.01.15	Kepala Dinas	1. Ketidapahaman masyarakat terkait kriteria anak yang memerlukan perlindungan Khusus 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan kasus yang terjadi di keluarga	Eksternal	1. Kasus Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara Optimal 3. Tidak tercapainya target Kabupaten Layak Anak (KLA)	1. Pemda 2. Dinas SosialP3AP2KB 3. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Meranti



Dra.KAMISAH M.Pd.I

NIP.19690219.199401 2 001

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial

NURHABIBI,SE

NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos

NIP. 19821212 201001 2 013

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NURHAYANTO, S.Pd.SD

NIP. 19680512 199303 1 010

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti									
Nama OPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
Tahun Penilaian	: 2025									
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026									
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak									
Sasaran strategis OPD	: 1. Meningkatnya Penanganan terhadap PPKS 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 4. Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak									
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Program : Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani : 82 %								
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil : 50 %								
	Sub Kegiatan 1.1: Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota : 30 Keluarga	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	ROO.1.06.2.08.2.14.01.01.01	Kepala Bidang Sosial	Minimnya SDM di bidang sosial untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Internal	Kegiatan pemberdayaan tidak sesuai dengan jadwal yang di tetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat KAT
	Sub Kegiatan 1.1: Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 30 Keluarga	Pelaksanaan	Kegiatan Pemetaan Sosial Dan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK) tidak berjalan sesuai Jadwal	ROO.1.06.2.08.2.14.01.01.02	Kepala Bidang Sosial	Narasumber tidak bisa hadir pada jadwal yang telah di tetapkan	Eksternal	Masyarakat Potensi KAT menjadi terlambat dalam mendapatkan layanan Pemetaan Sosial dan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK)	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat KAT

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Kegiatan 2 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas : 75 %								
	Sub Kegiatan 2.1 : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota : 101 Orang	Pelaksanaan	PSKS Pekerja Sosial Masyarakat kurang memahami terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat tersebut	ROO.1.06. 2.08.2.14. 01.02.01	Kepala Bidang Sosial	Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat	Internal	Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat 3. PSM
	Sub Kegiatan 2.2 : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yangMeningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 9 Orang	Pelaporan	Tidak adanya laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ke Dinas SosialPPPAPPKB	ROO.1.06. 2.08.2.14. 01.02.02	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya Koordinasi antara Dinas SosialPPPAPPKB dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Internal & Eksternal	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan sosial tidak terorganisasi dengan baik	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat 3. TKSK
	Sub Kegiatan 2.3 : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Lembaga	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 01.02.03	Kepala Bidang Sosial	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Peserta belum memahami tentang perannya dalam peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat 3. Lembaga Karang Taruna
2	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi : 30.178 Orang								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Kegiatan 3 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial : 52 %								
	Sub Kegiatan 3.1 : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota : 400 Orang	Pelaksanaan	1. Terdapat kemungkinan kesulitan dalam mendapatkan paket permakanan yang sudah di tentukan 2. Paket permakanan yang di beli rusak atau kadarwarsa	ROO.1.06. 2.08.2.14. 02.03.01	Kepala Bidang Sosial	1. Kurangnya Stock bahan permakanan yang tersedia di pasar kabupaten 2. Tidak adanya pemeriksaan yang teliti ketika memberi dan menerima paket bahan makanan	Internal & Eksternal	1. Paket permakanan tidak mencukupi sesuai target penerima 2. Penerima menolak bahan makanan yang akan di serahkan	Dinas SosialP3AP2KB & Calon Penerima Permakanan
	Sub Kegiatan 3.2 : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota : 290 Orang	Perencanaan	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat bantuan sandang	ROO.1.06. 2.08.2.14. 02.03.02	Kepala Bidang Sosial	Database calon penerima manfaat kurang valid	Internal	Bantuan sandang tidak tepat sasaran	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
			Pelaksanaan	Pengambilan bantuan sandang di wakilkan	ROO.1.06. 2.08.2.14. 02.03.03	Kepala Bidang Sosial	Calon Penerima sebagian besar adalah Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan	Eksternal	Bantuan sandang tidak sampai kepada penerima yang telah di tetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Sub Kegiatan 3.3 : Penyediaan Alat-Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota : 120 Orang	Perencanaan	Alat bantu tidak sesuai dengan Kebutuhan Penerima Manfaat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 02.03.04	Kepala Bidang Sosial	Kesalahan dalam asesment terhadap jenis disabilitas	Internal	Penerima manfaat tidak bisa menggunakan alat bantu sesuai dengan kebutuhan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Sub Kegiatan 3.4 : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota : 10 Orang	Perencanaan	Perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan layanan reunifikasi yang akan di berikan	ROO.1.06. 2.08.2.14. 02.03.05	Kepala Bidang Sosial	Perencanaan yang tidak dilakukan secara terpadu	Internal	Pelayanan Reunifikasi tidak bisa langsung dilaksanakan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 3.5 : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota : 50 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.07	Kepala Bidang Sosial	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Sub Kegiatan 3.6 : Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota : 20 Orang	Pelaksanaan	Ketelambatan dalam mempersiapkan kelengkapan persyaratan pelayanan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.08	Kepala Bidang Sosial	Penerima Manfaat belum mengetahui persyaratan yang perlu di siapkan	Eksternal	Administrasi Kependudukan yang di perlukan Penerima Manfaat akan lama siapnya	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Sub Kegiatan 3.7 : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota : 5 Orang	Pelaksanaan	Masyarakat penerima manfaat tidak mengetahui persyaratan untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.09	Kepala Bidang Sosial	Informasi terkait persyaratan hanya terdapat di dinding kantor dan Website Dinas Sosial	Internal	Masyarakat harus bolak-balik untuk memenuhi kelengkapan persyaratan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Sub Kegiatan 3.8 : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota : 1700 Orang	Pelaksanaan	Kesalahan dalam merekap data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelayanan pengaduan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.10	Kepala Bidang Sosial	Kurang telitinya petugas Operator Pelayanan	Internal	Data yang di dihasilkan menjadi tidak akurat	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 3.9 : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota : 50 Orang	Pelaksanaan	Waktu pelayanan kedaruratan yang di berikan tidak sesuai dengan prosedur	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.11	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya kendaraan Layanan Kedaruratan guna untuk pelayanan Reaksi Cepat	Internal	Pelayanan Kedaruratan yang di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan mengalami keterlambatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat
	Sub Kegiatan 3.10 : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota : 5 Orang	Perencanaan	Perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan layanan penelusuran keluarga yang akan di berikan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.12	Kepala Bidang Sosial	Perencanaan yang tidak dilakukan secara terpadu	Internal	Pelayanan penelusuran keluarga tidak bisa langsung dilaksanakan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Sub Kegiatan 3.11 : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota : 20 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyediaan kelengkapan administrasi pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.13	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait persyaratan layanan administrasi untuk pemberian layanan rujukan	Internal	Proses yang diperlukan dalam pemberian layanan rujukan kepada masyarakat menjadi panjang	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. KPM
	Kegiatan 4 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial : 100 %								
	Sub Kegiatan 4.1 : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota : 25 Orang	Pelaksanaan	Paket permakanan yang di beli kedaluwarsa	ROO.1.06.2.08.2.14.02.04.01	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya pemeriksaan yang teliti ketika membeli paket bahan makanan	Internal	Calon penerima menolak bahan makanan yang akan di serahkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Calon Penerima manfaat
	Sub Kegiatan 4.2 : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota : 58 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam menyiapkan kelengkapan administrasi persyaratan pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.04.02	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya informasi terkait persyaratan layanan administrasi untuk pemberian layanan rujukan	Internal	Proses yang diperlukan dalam pemberian layanan rujukan kepada masyarakat menjadi panjang	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Calon Penerima manfaat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
3	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial : 85 %								
	Kegiatan 5 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan : 92 %								
	Sub Kegiatan 5.1 : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata : 5.000 Orang	Pelaksanaan	Pendataan yang di lakukan kepada Fakir Miskin tidak tepat sasaran	ROO.1.06.2.08.2.14.03.05.01	Kepala Bidang Sosial	Masih adanya konflik kepentingan dalam pengusulan masyarakat miskin kedalam data DTKS	Internal & Eksternal	Masih ada masyarakat miskin yang belum masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial sehingga tidak mendapat bantuan dari pemerintah	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat Miskin 3. Stakeholders lainnya
	Sub Kegiatan 5.2 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota : 10.000 Keluarga	Pelaksanaan	Masih adanya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang perlu di perbaiki	ROO.1.06.2.08.2.14.03.05.02	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) oleh desa/kelurahan	Internal & Eksternal	Data tidak ter-update/ termutakhirkan sehingga masih ada KPM yang seharusnya tidak layak menerima bantuan tetapi masih tetap menerima bantuan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Pendamping PKH 3. Desa/kelurahan 4. Masyarakat Miskin
	Sub Kegiatan 5.3 : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota : 250 Orang	Perencanaan	Data masyarakat yang membutuhkan bantuan pengembangan ekonomi tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.03.05.03	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya koordinasi dengan pekerja lapangan yang bertugas turun langsung untuk melaksanakan pendataan	Internal	Pelayanan dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi dapat terhambat dan tidak tepat sasaran	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat Miskin
4	Program : Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan : 90 %								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Kegiatan 6 : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat : 100 %								
	Sub Kegiatan 6.1 : Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota : 50 Orang	Perencanaan	Perencanaan belum Memanfaatkan Pemetaan dan Mitigasi Bencana	ROO.1.06. 2.08.2.14. 04.06.01	Kepala Bidang Sosial	Belum adanya Integrasi Perencanaan Penanganan Bencana	Internal	Jumlah korban kejadian bencana melebihi dari target yang telah ditetapkan di dalam Perencanaan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Korban Bencana
			Pelaksanaan	Paket permakanaan yang di beli kedahuwarsa	ROO.1.06. 2.08.2.14. 04.06.01	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya pemeriksaan yang teliti ketika membeli paket bahan makanan	Internal	Korban Bencana menolak bahan makanan yang akan di serahkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Korban Bencana
	Sub Kegiatan 6.2 : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota : 68 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan sandang Kepada Korban Bencana	ROO.1.06. 2.08.2.14. 04.06.02	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya Kendaraan layanan Kedaruratan guna mengangkut bantuan logistik yang di miliki	Internal	Pelayanan terhadap Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mengalami Keterlambatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Korban Bencana
	Kegiatan 7 : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota : 30 Orang								
	Sub Kegiatan 7.1 : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota : 30 Orang	Perencanaan	Kurangnya peran serta Tagana dalam penanganan bencana	ROO.1.06. 2.08.2.14. 04.07.01	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya Koordinasi antara Dinas SosialPPPAPPKB dengan Taruna Siaga Bencana	Internal	Sosialisasi terkait kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana menjadi tidak optimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Korban Bencana 3. TAGANA

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
5	Program : Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan : 1 %								
	Kegiatan 8 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk : 2 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 8.1 : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Dokumen GDPK yang di susun belum sesuai Standar	ROO.1.06. 2.08.2.14. 05.08.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemahaman yang belum maksimal mengenai pokok-pokok pembangunan Kependudukan	Internal	Dokumen yang disusun tidak dapat di manfaatkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Stakeholder terkait
	Sub Kegiatan 8.2 : Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga : 9 Kegiatan	Pelaksanaan	Minimnya narasumber yang tersedia di OPD	ROO.1.06. 2.08.2.14. 05.08.02	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurang nya pengetahuan petugas terhadap hasil pemutakhiran data keluarga	Internal	Penyadian data dalam Sareschan tidak optimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Stakeholder terkait
6	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 74 %								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Kegiatan 9 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal : 4 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 9.1 : Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK : 2 Laporan	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan maksud tujuan awal dilaksanakannya kegiatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat
	Sub Kegiatan 9.2 : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) : 9 Laporan	Pelaksanaan	Kualitas Penyuluhan yang diberikan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.02	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya pengetahuan petugas terhadap standar pembinaan keluarga berencana	Internal	Informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak optimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat
			Pelaporan	Dokumen Pelaporan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.03	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak adanya format baku terkait laporan penyuluhan	Internal	Kualitas Laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana kurang memuaskan	1. Dinas SosialP3AP2KB
	Sub Kegiatan 9.3 : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) : 18 Laporan	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.04	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 9.4 : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Adanya kerusakan pada barang Cetak	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.05	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak adanya pemeriksaan yang teliti ketika menerima barang cetakan dari penyedia	Internal	Barang Cetak tidak bisa digunakan untuk kegiatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat
	Kegiatan 10 : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk : 100 %								
	Sub Kegiatan 10.1 : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) : 303 Orang	Pelaksanaan	Kualitas Penyuluhan yang dilaksanakan oleh kader IMP tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.06.10.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelatihan terkait tugas dan fungsi yang di berikan kepada kader IMP masih minim	Internal	Informasi yang di berikan kepada masyarakat menjadi tidak akurat	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Kader IMP 3. Masyarakat
	Kegiatan 11 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat : 44 %								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 11.1 : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya : 13 Laporan	Persiapan/perencanaan/penganggaran	Permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.1.06. 2.08.2.14. 06.11.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum adanya pelatihan terhadap perhitungan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Internal	Alat dan Obat kontrasepsi yang tersedia tidak mencukupi atau berlebih	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Faskes 3. Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur)
			Pelaksanaan	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi digudang alokon Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mencukupi untuk di salurkan ke Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	ROO.1.06. 2.08.2.14. 06.11.02	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keterlambatan dalam pengiriman logistik Obat dan Alat Kontrasepsi dari BKKBN pusat ke Gudang Alokon di Daerah	Eksternal	Terjadi keterlambatan distribusi alokon dari Gudang Alokon Daerah ke faskes dan jejaringnya	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Faskes 3. Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur)
			Pelaporan	Laporan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak akurat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 06.11.03	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan dari Faskes tidak sesuai jadwal	Eksternal	Keterlambatan dalam penyampaian Laporan Alokon ke pusat	1. Dinas SosialP3AP2KB
	Sub Kegiatan 11.2 : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : 610 Orang	Pelaksanaan	Kegagalan Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau bahkan bisa menimbulkan resiko kehamilan.	ROO.1.06. 2.08.2.14. 06.11.04	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya ketelitian dari tenaga medis dan kurangnya pengetahuan aksetor kb mengenai alat dan obat kontrasepsi	Internal & Eksternal	Akseptor KB mengalami ketidaknyamanan hingga menimbulkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur) 3. Tenaga Medis
	Sub Kegiatan 11.3 : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya : 13 Laporan	Pelaporan	Keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Pembinaan	ROO.1.06. 2.08.2.14. 06.11.05	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Format laporan tidak sesuai kriteria	Internal	Laporan kinerja ke pusat menjadi terlambat	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Petugas
	Sub Kegiatan 11.4 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi : 50 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 06.11.06	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Petugas Medis Pelayanan KB

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Kegiatan 12 : Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB : 100 %								
	Sub Kegiatan 12.1 : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) : 26 Kampung	Pelaksanaan	Peserta sosialisasi kegiatan kurang memahami tujuan dari kampung KB	ROO.1.06.2.08.2.14.06.12.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peserta masih beranggapan bahwa KB itu hanya pembatasan kelahiran dengan 2 Anak Cukup	Eksternal	Program Bangga Kencana tidak dapat berjalan dengan baik	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat
7	Program : Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL : 79%								
	Kegiatan 13 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga : 92%								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 13.1 : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) : 1 Laporan	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 07.13.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Kader Poktan
	Sub Kegiatan 13.2 : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia : 10 Unit	Pelaksanaan	Adanya kerusakan pada BKB Kit Stunting	ROO.1.06. 2.08.2.14. 07.13.02	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak adanya pemeriksaan yang teliti ketika serah terima barang	Internal	Barang tidak bisa digunakan untuk memberikan edukasi kepada keluarga balita mengenai cara mencegah stunting	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat
	Sub Kegiatan 13.3 : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) : 30 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 07.13.03	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Kader Poktan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 13.4 : Penyediaan Biaya dan Pelaksana (Kader) Operasional bagi Ketahanan dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan : 741 Orang	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan : 741 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam memberikan bantuan Operasional terhadap kader Pendamping Keluarga	ROO.1.06.2.08.2.14.07.13.04	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan Sistem Pembayaran dari pemberian uang langsung menjadi Transfer ke rekening masing-masing kader	Eksternal	Terganggunya kegiatan Pendampingan yang dilakukan oleh Kader Pendamping Keluarga	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Kader Pendamping Keluarga 3. Masyarakat
8	Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan : 40%								
	Kegiatan 14 : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota : 50%								
	Sub Kegiatan 14.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Persiapan/ perencanaan/ penganggaran	Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melatih TIM POKJA PUG dalam menyusun RAD pelaksanaan PUG	Internal	Kurangnya Nilai RAD dalam Penilaian Evaluasi APE	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. POKJA PUG
			Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber guna Kegiatan Penguatan PPRG dan POKJA PUG yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.02	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. POKJA PUG

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 14.2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Rendahnya Pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.03	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya Pemahaman tentang Konsep PUG	Eksternal	Minimnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. POKJA PUG
	Sub Kegiatan 14.3 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG : 35 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.04	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. POKJA PUG
	Kegiatan 15 : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota : 25%								
	Sub Kegiatan 15.1 : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.15.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 15.2 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota : 12 Organisasi	Pelaksanaan	Tidak semua peserta Advokasi menghadiri kegiatan	ROO.1.06.2.08.2.14.08.15.02	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya Koordinasi dalam menentukan jadwal kegiatan	Internal	Belum semua Organisasi Masyarakat mendapatkan Advokasi	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Organisasi Perempuan
	Kegiatan 16 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : 100%								
	Sub Kegiatan 16.1 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas : 50 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.16.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Perempuan
	Sub Kegiatan 16.2 : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.16.02	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Informasi yang di berikan tidak sesuai dengan kebutuhan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Perempuan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
9	Program : Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif : 100%		50 Orang						
	Kegiatan 17 : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT : 0,005 %								
	Sub Kegiatan 17.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai Jadwal	ROO.1.06.2.08.2.14.09.17.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya Koordinasi dengan Stakeholder terkait dalam menentukan waktu pelaksanaan Kegiatan	Internal	Pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Stakeholder dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	Sub Kegiatan 17.2 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : 20 Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.09.17.02	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perangkat Daerah 3. Perempuan
	Kegiatan 18 : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan : 100 %								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 18.1 : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan : 20 Orang	Pelaksanaan	Ada kasus perempuan korban kekerasan yang tidak mendapat penanganan	ROO.1.06. 2.08.2.14. 09.18.01	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Kurangnya informasi masyarakat mengenai tempat pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Internal	Rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan Korban Kekerasan
	Sub Kegiatan 18.2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota : 15 Layanan	Pelaksanaan	Waktu pelayanan Pendampingan terhadap Perempuan korban kekerasan tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan	ROO.1.06. 2.08.2.14. 09.18.02	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Tidak tersedianya Tenaga Ahli (Konselor, Psikolog, dll) yang menangani Pelayanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal & Eksternal	Layanan Pendampingan yang di berikan membutuhkan waktu cukup lama dari yang sudah di tetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan Korban Kekerasan
	Kegiatan 19 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan : 2 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 19.1 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas : 80 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06. 2.08.2.14. 09.19.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan 3. Perempuan Korban Kekerasan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tabap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 19.2 : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Minimnya Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan	ROO.1.06.2.08.2.14.09.19.02	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum terfasilitasinya atau terlaksanyanya forum diskusi antar lembaga	Internal	Masih Belum tersentralisasinya tujuan dan fokus peran lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan 3. Perempuan Korban Kekerasan
10	Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup : 70 Kelompok Masyarakat								
	Kegiatan 20 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota : 1 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 20.1 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota : 30 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.10.20.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 3. KPM

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
11	Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti : 1 Dokumen								
	Kegiatan 21 : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : 1 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 21.1 : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Pemilihan Tenaga Ahli yang penyusun Profil data Gendar dan Anak yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.11.21.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak adanya penyedia sesuai kualifikasi	Internal	Dokumen yang di hasilkan tidak sesuai standar	1. Dinas SosialP3AP2KB
12	Program : Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak : 115 Lembaga								
	Kegiatan 22 : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota : 100%								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 22.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaporan	Monev KLA yang belum Optimal	ROO.1.06.2.08.2.14.12.22.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Minimnya Kapasitas SDM	Internal	Target Pencapaian KLA tidak tercapai	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Anak
	Kegiatan 23 : Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota : 2 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 23.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.12.23.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Anak
	Sub Kegiatan 23.2 : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.12.23.02	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Forum Anak
			Pelaporan	Minimnya kerjasama antar lembaga penyedia peningkatan Kualitas Hidup Anak	ROO.1.06.2.08.2.14.12.23.03	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum terfasilitasinya atau terlaksanyanya forum diskusi antar lembaga	Internal & Eksternal	Masih Belum tersentralisasinya tujuan dan fokus peran lembaga penyedia peningkatan kualitas idup anak	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Forum Anak

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
13	Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrehensif : 100%								
	Kegiatan 24 : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di sediakan : 100%								
	Sub Kegiatan 24.1 : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan : 30 Orang	Pelaksanaan	Masih ada Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang belum mendapatkan Pelayanan	ROO.1.06.2.08.2.14.13.24.01	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Kurangnya informasi masyarakat mengenai tempat pengaduan terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia	Internal	Rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
	Sub Kegiatan 24.2 : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan : 25 Layanan	Pelaksanaan	Waktu pelayanan Pendampingan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan	ROO.1.06.2.08.2.14.13.24.02	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Tidak tersedianya Tenaga Ahli (Konselor, Psikolog, dll) yang menangani Pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal & Eksternal	Layanan Pendampingan yang di berikan membutuhkan waktu cukup lama dari yang sudah di tetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
	Kegiatan 25 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : 1 Kegiatan								

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sub Kegiatan 25.1 : Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK : 50 Orang	Pelaksanaan	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.13.25.01	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panitia tidak selektif dalam menentukan narasumber	Internal	Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga penyedia layanan Perlindungan AMPK

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



Dra. KAMISAH, M.Pd.I
NIP. 19690219 199401 2 001

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial



NURHABIBI, SE
NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NURHAYANTO, S.Pd.SD
NIP. 19680512 199303 1 010

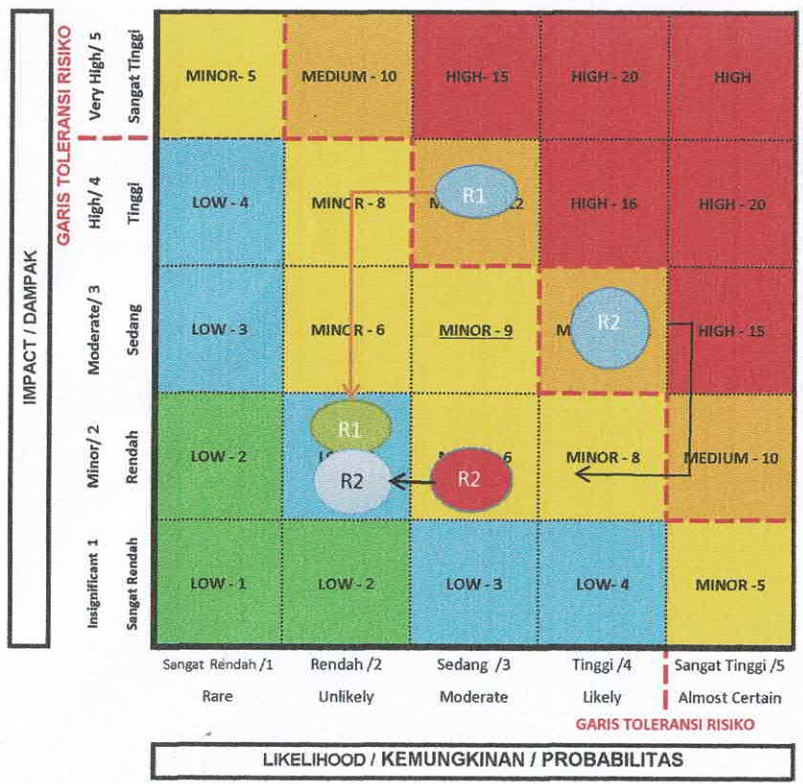
4. Kepala UPTD PPA



MARTINI, SE
NIP. 19771104 200701 2 004

MATRIK RISIKO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dampak



Tingkat kemungkinan

		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
	Skala	1	2	3	4	5
Hampir pasti terjadi	5	9	15	18	23	25
sering terjadi	4	6	12	16	19	24
Kadang terjadi	3	4	10	14	17	22
Jarang terjadi	2	2	7	11	13	21
Hampir tidak pernah terjadi	1	1	3	5	8	20

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Nama OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)											
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
I	Risiko Strategis OPD										
1	Database terkait Jumlah KAT di Kepulauan Meranti belum seluruhnya Valid	RSO.1.06.2.08.2.14.01.01	4	4	19	Melakukan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK), Bimbingan Sosial dan Semiloka Daerah	Kurangnya Jumlah Personil untuk Menjalankan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK), Bimbingan Sosial dan Semiloka Daerah	4	3	17	✓
2	Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum maksimal	RSO.1.06.2.08.2.14.01.02	4	2	13	Meningkatkan Koordinasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara berkala serta memberikan Pembekalan terkait pentingnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan PSKS di satu titik	3	2	11	x
3	Belum Validnya data PMKS yang ada	RSO.1.06.2.08.2.14.01.03	5	4	24	Masih menggunakan data PMKS hasil Pemutakhiran data terakhir guna memberikan layanan Rehabilitasi Sosial	Terdapat data PMKS yang sudah meninggal dan PMKS baru yang belum masuk kedalam Database PMKS sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial	4	4	19	✓
4	Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial masih ada yang tidak tepat sasaran	RSO.1.06.2.08.2.14.01.04	4	4	19	Verifikasi dan Validasi usulan desa terkait KPM yang di masukkan kedalam DTKS hanya by sistem melalui Aplikasi SIKS-NG	Data usulan desa terkait KPM yang di masukkan kedalam DTKS tidak di cek kebenarannya di lapangan	3	4	16	✓

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	RSO.1.06.2.08.2.14.01.05	4	3	17	• Berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya untuk mendistribusikan penyaluran Bantuan Logistik • Meningkatkan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menindak lanjuti dengan cepat segala hal yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	• Kendaraan yang dimiliki OPD terkait tidak Ready • Kuantitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang benar-benar memahami tugas dan fungsinya masih kurang	4	2	12	✓
6	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan tidak bisa di prediksi	RSO.1.06.2.08.2.14.01.06	4	3	17	Penanganan terhadap korban bencana yang melebihi target dari yang telah ditetapkan di alokasikan melalui pos Belanja Tak Terduga APBD	Pengeluaran belanja tak terduga untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan di harapkan tidak berulang	2	3	10	x
7	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen GDPK yang di manfaatkan untuk pengambilan ke bijakan	RSO.1.06.2.08.2.14.01.07	3	3	14	Mengoptimalkan Koordinasi dengan stakeholders terkait penyusunan dokumen GDPK	Susahnya dalam harmonisasi waktu pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait	3	2	10	x
8	Tidak semua Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut Ber-KB	RSO.1.06.2.08.2.14.01.08	4	3	17	Mengadvokasi dan mengedukasi tokoh masyarakat dan tokoh Agama setempat guna mengurangi perbedaan pandangan di masyarakat terkait penggunaan Alat Kontrasepsi	Advokasi dan edukasi yang dilaksanakan belum sesuai dengan Standar	4	2	13	✓
9	Kurangnya minat keluarga sasaran untuk menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	RSO.1.06.2.08.2.14.01.09	3	4	16	Menginstruksikan kepada Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk melaporkan setiap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan	Tidak semua kepada Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang melaporkan kegiatan penyuluhannya	3	3	14	✓
10	Kurangnya pemahaman dan dukungan dari pada Stake Holder dalam pelaksanaan PUG	RSO.1.06.2.08.2.14.01.10	4	3	17	Melakukan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG kepada Tim POKJA PUG daerah	Tidak semua OPD hadir dalam kediatan Advokasi	3	3	14	✓
11	Minimnya Laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.1.06.2.08.2.14.01.11	4	3	17	1. Sosialisasi Layanan Pengaduan UPT PPA 2. Penguatan Jejaring Lembaga Perlindungan Anak	Tidak semua Aspek masyarakat mendapatkan sosialisasi	3	3	14	✓

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
12	Rendahnya pengetahuan peran dari tanggungjawab ibu rumah tangga dalam membina keluarga yang harmonis dan sejahtera	RSO.1.06.2.08.2.14.01.12	3	3	14	Memberikan Pelatihan terkait peningkatan kualitas keluarga kepada SDM Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Pelatihan yang di berikan masih secara umum belum menyentuh aspek-aspek mendasar dalam peningkatan Kualitas Keluarga	3	2	11	x
13	Tidak tersedianya data Gender dan Anak yang terpilah	RSO.1.06.2.08.2.14.01.13	3	3	14	Melakukan Seleksi yang ketat dalam memilih Pihak Penyedia Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Profil Data Gender dan Anak	Adanya Konflik Kepentingan dalam menentukan Penyedia	3	2	11	x
14	Masih sedikit forum anak yang Aktif	RSO.1.06.2.08.2.14.01.14	3	3	14	Meningkatkan Koordinasi dengan forum anak tingkat kecamatan dalam membina forum anak yang di bawahnya secara bertingkat secara Online	Fasilitas Jaringan di tiap-tiap sekretariat forum anak kurang memadai	3	2	11	x
15	Minimnya Laporan Tindak Kekerasan terhadap Anak	RSO.1.06.2.08.2.14.01.15	4	3	17	1. Sosialisasi Layanan Pengaduan UPT PPA 2. Penguatan Jejaring Lembaga Perlindungan Anak	Tidak semua Aspek masyarakat mendapatkan sosialisasi	3	3	14	✓
II Risiko Operasional											
1	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	ROO.1.06.2.08.2.14.01.01.01	3	3	14	Melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan	Sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dengan pihak LKS	3	2	11	x
2	Kegiatan Pemetaan Sosial Dan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK) tidak berjalan sesuai Jadwal	ROO.1.06.2.08.2.14.01.01.02	4	2	13	Berkoordinasi secara rutin dengan Narasumber mengenai kesiapan waktu narasumber untuk mengikuti kegiatan	Sulitnya harmonisasi waktu yang pas dengan Narasumber	3	2	11	x
3	PSKS Pekerja Sosial Masyarakat kurang memahami terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat tersebut	ROO.1.06.2.08.2.14.01.02.01	4	3	17	Membuat dan Mensosialisasikan petunjuk Pelaksanaan terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu melakukan sosialisasi ke seluruh desa	2	3	10	x
4	Tidak adanya laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ke Dinas SosialPPPAPPKB	ROO.1.06.2.08.2.14.01.02.02	3	4	16	Mengumpulkan TKSK di Dinas SosialPPPAPPKB guna menyamakan persepsi terkait kegiatan pemberdayaan yang di laksanakan	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu mengumpulkan TKSK di satu titik	3	3	14	✓

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.02.03	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
6	1. Terdapat kemungkinan kesulitan dalam mendapatkan paket permakanan yang sudah di tentukan 2. Paket permakanan yang di beli rusak atau kadarwarsa	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.01	4	3	17	1. Berkoordinasi dengan pihak Penyedia terkait ketersediaan stock bahan permakanan 2. Melakukan pengecekan jumlah dan jenis barang yang di beli	1. Ada kemungkinan stock dari penyedia tidak mencukupi sesuai target 2. Ada kemungkinan semua barang tidak di periksa atau di cek	4	2	13	✓
7	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat bantuan sandang	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.02	4	3	17	Melakukan Assesment kepada calon penerima	Kurangnya jumlah SDM yang bertugas melakukan Assesment	3	3	14	✓
8	Pengambilan bantuan sandang di wakikan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.03	3	3	14	Membawa surat kuasa apabila pengambilan bantuan sandang di wakikan	Surat kuasa tida sesuai ketentuan	2	3	10	x
9	Alat bantu tidak sesuai dengan Kebutuhan Penerima Manfaat	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.04	4	2	13	Assesment dilaksanakan jauh hari sebelum kegiatan di laksanakan	Kurangnya jumlah SDM yang bertugas melakukan Assesment	3	2	11	x
10	Perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan layanan reunifikasi yang akan di berikan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.05	4	3	17	Melakukan Assesment kepada calon KPM yang membutuhkan pelayanan Reunifikasi	Kurangnya jumlah SDM yang bertugas melakukan Assesment	3	3	14	✓
11	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.07	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Narasumber tidak memiliki Sertifikat	2	3	10	x
12	Ketelambatan dalam mempersiapkan kelengkapan persyaratan pelayanan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.08	4	2	13	Petugas langsung menjemput persyaratan yang di perlukan ke rumah penerima manfaat dan di uruskan ke Instansi terkait	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu lebih ke tempat tinggal penerima manfaat	3	2	11	x
13	Masyarakat penerima manfaat tidak mengetahui persyaratan untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.09	3	3	14	Menyampaikan Informasi kepada Perangkat Desa serta Operator DTKS tingkat desa terkait Persyaratan untuk mendapatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kesalahan dalam meneruskan Informasi yang di berikan	2	3	10	x
14	Kesalahan dalam merekap data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelayanan pengaduan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.10	4	2	13	Melakukan pengecekan ulang sebelum data di berikan kepada lain yang perlu	Tidak semua data tercek satu-satu	3	2	11	x

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
15	Waktu pelayanan kedaruratan yang di berikan tidak sesuai dengan prosedur	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.11	4	3	17	Berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya guna pemberian layanan kedaruratan yang di butuhkan	Kendaraan tidak Standby	4	2	13	✓
16	Perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan layanan penelusuran keluarga yang akan di berikan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.12	4	3	17	Melakukan Assesment kepada calon KPM yang membutuhkan pelayanan Reunifikasi	Kurangnya jumlah SDM yang bertugas melakukan Assesment	3	3	14	✓
17	Keterlambatan dalam penyediaan kelengkapan administrasi pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.03.13	3	3	14	Menyebarkan Informasi melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada terkait Administrasi yang di perlukan dalam pemberian layanan Rujukan	Informasi yang di berikan bisa kemungkinan tidak akurat karena tidak di sertai dengan selebaran	3	2	11	x
18	Paket permakanan yang di beli kedaluwarsa	ROO.1.06.2.08.2.14.02.04.01	4	3	17	Melakukan pengecekan tanggal kedaluwarsa jenis barang yang di beli	Semua barang tidak tercek dengan teliti	4	2	13	✓
19	Keterlambatan dalam menyiapkan kelengkapan administrasi persyaratan pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.02.04.02	3	3	14	Menyebarkan Informasi melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Stake Holder yang ada terkait Administrasi yang di perlukan dalam pemberian layanan Rujukan	Informasi yang di berikan bisa kemungkinan tidak akurat karena tidak di sertai dengan selebaran	3	2	11	x
20	Pendataan yang di lakukan kepada Fakir Miskin tidak tepat sasaran	ROO.1.06.2.08.2.14.03.05.01	5	3	22	Verifikasi usulan desa terkait masyarakat miskin untuk di masukkan kedalam data DTKS masih sekedar by sistem	Data usulan ada kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi Riil karena tidak ada proses cek langsung ke lapangan	4	3	17	✓
21	Masih adanya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang perlu di perbaiki	ROO.1.06.2.08.2.14.03.05.02	4	3	17	Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mampu agar keluar secara mandiri sebagai penerima bantuan sehingga kuota bantuan dapat diisi oleh KPM yang lebih membutuhkan	KPM penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan tidak mau keluar sebagai penerima bantuan secara mandiri	4	3	17	✓
22	Data masyarakat yang membutuhkan bantuan pengembangan ekonomi tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.03.05.03	4	3	17	Meningkatkan Koordinasi dengan pekerja di lapangan guna pemenuhan kelengkapan persyaratan pengembangan ekonomi	Koordinasi dilakukan via online melalui Grup Wa	3	3	14	✓
23	Perencanaan belum Memanfaatkan Pemetaan dan Mitigasi Bencana	ROO.1.06.2.08.2.14.04.06.01	3	3	14	Penanganan terhadap korban bencana yang melebihi target dari yang telah di tetapkan di alokasikan melalui pos Belanja Tak Terduga APBD	Pengeluaran belanja tak terduga untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan di harapkan tidak berulang	2	3	10	x

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
24	Paket permakanan yang di beli kedaluwarsa	ROO.1.06.2.08.2.14.04.06.01	4	3	17	Melakukan pengecekan tanggal kedaluwarsa jenis barang yang di beli	Semua barang tidak tercek dengan teliti	4	2	13	✓
25	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan sandang Kepada Korban Bencana	ROO.1.06.2.08.2.14.04.06.02	4	3	17	Berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya untuk mendistribusikan penyaluran Bantuan Logistik	Kendaraan yang dimiliki OPD terkait dalam penanggulangan bencana tidak Ready	3	3	14	✓
26	Kurangnya peran serta Tagana dalam penanganan bencana	ROO.1.06.2.08.2.14.04.07.01	3	3	14	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak TAGANA guna membahas peran serta dari pada TAGANA dalam kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu mengumpulkan TAGANA di satu titik	3	2	11	x
27	Dokumen GDPK yang di susun belum sesuai Standar	ROO.1.06.2.08.2.14.05.08.01	3	3	14	Mendatangkan Narasumber yang tepat dalam penyusunan Dokumen GDPK	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
28	Minimnya narasumber yang tersedia di OPD	ROO.1.06.2.08.2.14.05.08.02	3	3	14	Mendatangkan Narasumber dari Luar Perangkat Daerah yang memiliki Kompetensi	Sulitnya harmonisasi waktu yang pas dengan Narasumber	3	2	11	x
29	Pemilihan Narasumber yang tidak	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.01	4	2	13	Berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
30	Kualitas Penyuluhan yang di berikan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.02	3	3	14	Meningkatkan pengetahuan petugas terhadap standar pembinaan Keluarga Berencana	Tidak semua petugas yang ada mengikuti pembinaan	3	2	11	x
31	Dokumen Pelaporan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.03	4	3	17	Melakukan pemeriksaan dan meminta merevisi ulang setiap laporan yang tidak sesuai standar	Belum adanya Reverensi terkait Format laporan yang baku	3	3	14	✓
32	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.04	3	3	14	Berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
33	Adanya kerusakan pada barang Cetakan	ROO.1.06.2.08.2.14.06.09.05	4	3	17	Melakukan pengecekan barang ketika di terima dari pihak penyedia	Tidak semua barang tercek dengan teliti	3	3	13	✓
34	Kualitas Penyuluhan yang di laksanakan oleh kader IMP tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.06.10.01	3	3	14	Melakukan Pembinaan terhadap Kader IMP melalui pertemuan putin dengan PKB/PLKB	Tidak semua kader IMP rutin untuk mengikuti pertemuan guna mendapatkan pembinaan	3	2	11	x

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
35	Permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.1.06.2.08.2.14.06.11.01	4	3	17	Meningkatkan SDM yang menangani perhitungan permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan mengikutsertakan kedalam pelatihan yang sesuai	Belum adanya informasi terkait pelatihan yang di perlukan	3	3	14	✓
36	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi digudang alokon Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mencukupi untuk di salurkan ke Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	ROO.1.06.2.08.2.14.06.11.02	4	3	17	Mempercepat permintaan dan jadwal pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi kepada BKKBN perwakilan Riau	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam penyaluran Alokon dari Pusat ke Daerah	3	2	11	x
37	Laporan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.06.11.03	3	3	14	Meningkatkan Koordinasi dengan Faskes dan Jejaringnya untuk mempercepat penyampaian Laporan	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu dari faskes untuk menyampaikan laporan	3	2	11	x
38	Kegagalan Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau bahkan bisa menimbulkan resiko kehamilan.	ROO.1.06.2.08.2.14.06.11.04	4	3	17	Mengadakan pelatihan sertifikasi bagi tenaga medis untuk pemasangan alat kontrasepsi mengenai pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang yang baik dan benar.	Ketidakpatuhan akseptor KB dalam mematuhi prosedur pelayanan KB.	3	3	14	✓
39	Keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Pembinaan	ROO.1.06.2.08.2.14.06.11.05	3	3	14	Membuat format baku terkait laporan pembinaan	Format tidak seusai dengan ketentuan pusat	3	2	11	x
40	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.06.11.06	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
41	Peserta sosialisasi kegiatan kurang memahami tujuan dari kampung KB	ROO.1.06.2.08.2.14.06.12.01	4	2	13	Dalam pemaparan materi sosialisasi tidak terlalu berfokus pada pembatasan kelahiran, melainkan mengenai keluarga sejahtera dan keluarga berkualitas	Materi Sosialisasi tidak di jabarkan secara jelas mengenai Program Bangga Kencana	3	2	11	x
42	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.07.13.01	3	3	14	Berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
43	Adanya kerusakan pada BKB Kit Stunting	ROO.1.06.2.08.2.14.07.13.02	4	3	17	Melakukan pengecekan secara teliti ketika barang di terima dari pihak penyedia	Tidak semua barang tercek dengan teliti	4	2	13	✓

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
44	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.07.13.03	3	3	14	Berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
45	Keterlambatan dalam memberikan bantuan Operasional terhadap kader Pendamping Keluarga	ROO.1.06.2.08.2.14.07.13.04	4	2	13	Berkoordinasi dengan bank penyalur serta mengumpulkan Rekening masing-masing kader	Memakan waktu yang lama mengingat banyaknya jumlah rekening yang harus di kumpulkan	4	1	8	x
46	Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.01	3	3	14	Melakukan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG kepada Tim POKJA PUG daerah	Belum Semua TIM POPJA PUG Daerah yang mendapatkan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG	3	2	11	x
47	Pemilihan Narasumber guna Kegiatan Penguatan PPRG dan POKJA PUG yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.02	4	2	13	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
48	Rendahnya Pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.03	3	4	16	Melakukan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) kepada Tim POKJA PUG daerah	Belum Semua TIM POPJA PUG Daerah yang mendapatkan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	3	3	14	✓
49	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.14.04	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
50	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.15.01	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
51	Tidak semua peserta Advokasi menghadiri kegiatan	ROO.1.06.2.08.2.14.08.15.02	3	3	14	Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh Organisasi Perempuan yang menjadi target sasaran kegiatan	Susahnya mengharmonisasi waktu yang pas dengan seluruh Organisasi Perempuan yang menjadi target kegiatan	3	2	11	x
52	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.16.01	4	2	13	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
53	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.08.16.02	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
54	Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai Jadwal	ROO.1.06.2.08.2.14.09.17.01	3	3	14	Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan	Susahnya Mengharmonisasi waktu yang pas	3	2	11	x
55	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.09.17.02	4	2	13	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
56	Ada kasus perempuan korban kekerasan yang tidak mendapat penanganan	ROO.1.06.2.08.2.14.09.18.01	4	3	17	Melakukan Sosialisasi melalui pembuatan Banner dan Pamflet untuk di letakkan atau di bagikan di tempat-tempat strategis	Kegiatan belum mencakup keseluruhan daerah terutama daerah-daerah terpencil yang susah di akses	4	2	13	✓
57	Waktu pelayanan Pendampingan terhadap Perempuan korban kekerasan tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan	ROO.1.06.2.08.2.14.09.18.02	4	3	17	Mendatangkan Tenaga Ahli (Konselor, Psikolog, dll) dari Luar Daerah untuk membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Untuk mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Membutuhkan waktu yang lebih	3	3	14	✓
58	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.09.19.01	4	2	13	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
59	Minimnya Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan	ROO.1.06.2.08.2.14.09.19.02	3	3	14	Meningkatkan Koordinasi dengan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan secara online	Fasilitas Jaringan yang kurang memadai	3	2	11	x
60	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.10.20.01	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
61	Pemilihan Tenaga Ahli yang penyusun Profil data Gendar dan Anak yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.11.21.01	4	3	17	Melakukan pengadaan ulang untuk mencari penyedia yang sesuai Kualifikasi	Masih ada yang memenuhi kualifikasi	4	2	13	✓
62	Monev KLA yang belum Optimal	ROO.1.06.2.08.2.14.12.22.01	4	3	17	Melakukan Pembinaan dan sosialisasi terkait pemenuhan Dokumen Pendukung KLA	Tidak semua stakeholder terkait yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi	3	3	14	✓
63	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.12.23.01	4	2	13	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
64	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.12.23.02	4	2	13	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x
65	Minimnya kerjasama antar lembaga penyedia peningkatan Kualitas Hidup Anak	ROO.1.06.2.08.2.14.12.23.03	3	3	14	Meningkatkan Koordinasi dengan forum anak tingkat kecamatan dalam membina forum anak yang di bawahnya secara bertingkat secara Online	Fasilitas Jaringan di tiap-tiap sekretariat forum anak kurang memadai	3	2	11	x
66	Masih ada Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang belum mendapatkan Pelayanan	ROO.1.06.2.08.2.14.13.24.01	4	3	17	Melakukan Sosialisasi melalui pembuatan Banner dan Pamflet untuk di letakkan atau di bagikan di tempat-tempat strategis	Kegiatan belum mencakup keseluruhan daerah terutama daerah-daerah terpencil yang susah di akses	4	2	13	✓
67	Waktu pelayanan Pendampingan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan	ROO.1.06.2.08.2.14.13.24.02	4	3	17	Mendatangkan Tenaga Ahli (Konselor, Psikolog, dll) dari Luar Daerah untuk membantu penanganan kasus terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Untuk mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Membutuhkan waktu yang lebih	3	3	14	✓
68	Pemilihan Narasumber yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2.14.13.25.01	3	3	14	Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Riau untuk menetapkan Narasumber yang tepat	Harmonisasi Waktu yang pas dengan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan	3	2	11	x

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti

Dra. K. MISAH, M.Pd.I

NIP. 19800401 200012 1 001

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial

NURHABIBI, SE

NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DESTI MUSTIKA SAMBRA, S.Sos

NIP. 19821212 201001 2 043

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NURHAYANTO, S.Pd.SD

NIP. 19680512 199303 1 010

4. Kepala UPTD PPA

MARTINI, SE

NIP. 19771104 200701 2 004

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti				
Nama OPD		: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesenjangan Gender 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak				
Urusan Pemerintahan		: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
I	Risiko Strategis OPD					
1	Database terkait Jumlah KAT di Kepulauan Meranti belum seluruhnya Valid	RSO.1.06.2.08.2.14.01.01	1. Melakukan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK), Bimbingan Sosial dan Semiloka Daerah 2. Mengusulkan Penambahan Personil SDM untuk Bidang Sosial Ke BKPSDM	Kepala Dinas	Update Database KAT	Triwulan II-IV
2	Belum Validnya data PMKS yang ada	RSO.1.06.2.08.2.14.01.03	Melakukan pendataan guna Update data PMKS terbaru	Kepala Dinas	Database PMKS	Triwulan II-IV
3	Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial masih ada yang tidak tepat sasaran	RSO.1.06.2.08.2.14.01.04	Melakukan Verifikasi langsung ke lapangan terhadap usulan data KMP oleh desa yang di usulkan untuk dimasukkan kedalam DTKS	Kepala Dinas	Berita Acara Hasil Verifikasi	Triwulan II-IV
4	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	RSO.1.06.2.08.2.14.01.05	• Menggunakan kendaraan Umum dalam menyalurkan Bantuan Logistik kepada Korban Bencana • Meningkatkan Koordinasi dengan pihak Desa/kelurahan terkait kejadian bencana yang ada di daerahnya	Kepala Dinas	Laporan Bantuan Sosial terhadap Korban Bencana	Triwulan II-IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
5	Tidak semua Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut Ber-KB	RSO.1.06.2.08.2. 14.01.08	Memberikan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait penggunaan alat Kontrasepsi dalam Ber-KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kepala Dinas	Laporan Perhitungan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB	Triwulan II-IV
6	Kurangnya minat keluarga sasaran untuk menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	RSO.1.06.2.08.2. 14.01.09	Memberikan Orientasi/Pelatihan Teknis kepada Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Dinas	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan	Triwulan II-IV
7	Kurangnya pemahaman dan dukungan dari pada Stake Holder dalam pelaksanaan PUG	RSO.1.06.2.08.2. 14.01.10	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait pelaksanaan PUG pada lembaga pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti	Kepala Dinas	Draft Rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang tersusun	Triwulan II-IV
8	Minimnya Laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.1.06.2.08.2. 14.01.11	Melakukan Sosialisasi terkait Hotline pengaduan UPT PPA melalui pembuatan Banner dan Pamflet yang di sebarakan di lokasi-lokasi Strategis	Kepala Dinas	Laporan Kasus	Triwulan II-IV
9	Minimnya Laporan Tindak Kekerasan terhadap Anak	RSO.1.06.2.08.2. 14.01.15	Melakukan Sosialisasi terkait Hotline pengaduan UPT PPA melalui pembuatan Banner dan Pamflet yang di sebarakan di lokasi-lokasi Strategis	Kepala Dinas	Laporan Kasus	Triwulan II-IV
II	Risiko Operasional OPD					
1	Tidak adanya laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ke Dinas Sosial PPPAPPKB	ROO.1.06.2.08.2. 14.01.02.02	Melakukan monitoring kegiatan pemberdayaan sosial oleh TKSK	Kepala Bidang Sosial	Laporan kegiatan	Triwulan II-IV
2	1. Terdapat kemungkinan kesulitan dalam mendapatkan paket permakanan yang sudah di tentukan 2. Paket permakanan yang di beli rusak atau kadawarsa	ROO.1.06.2.08.2. 14.02.03.01	1 Mencari alternatif penyedia lain 2 Memastikan bahwa barang yang rusak bisa di kembalikan	Kepala Bidang Sosial	Berita Acara	Triwulan II-IV
3	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat bantuan sandang	ROO.1.06.2.08.2. 14.02.03.02	Melakukan Verifikasi kembali sebelum bantuan sandang di serahkan	Kepala Bidang Sosial	Laporan hasil Verifikasi	Triwulan II-IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
4	Perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan layanan reunifikasi yang akan di berikan	ROO.1.06.2.08.2 .14.02.03.05	Perubahan Dokumen Perencanaan	Kepala Bidang Sosial	Dokumen Perubahan Renja	Triwulan IV
5	Waktu pelayanan kedaruratan yang di berikan tidak sesuai dengan prosedur	ROO.1.06.2.08.2 .14.02.03.11	Menggunakan kendaraan Umum dalam memberikan layanan Kedaruratan	Kepala Bidang Sosial	Laporan Pelayanan Kedaruratan yang di berikan	Triwulan II-IV
6	Perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan layanan penelusuran keluarga yang akan di berikan	ROO.1.06.2.08.2 .14.02.03.12	Perubahan Dokumen Perencanaan	Kepala Bidang Sosial	Dokumen Perubahan Renja	Triwulan IV
7	Paket permakanan yang di beli kedaluwarsa	ROO.1.06.2.08.2 .14.02.04.01	Memastikan bahwa barang yang kedaluwarsa bisa di kembalikan	Kepala Bidang Sosial	Berita Acara	Triwulan II-IV
8	Pendataan yang di lakukan kepada Fakir Miskin tidak tepat sasaran	ROO.1.06.2.08.2 .14.03.05.01	Melakukan Verifikasi langsung ke lapangan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH dalam Proses Verifikasi	Kepala Bidang Sosial	Laporan hasil Verifikasi	Triwulan II-IV
9	Masih adanya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang perlu di perbaiki	ROO.1.06.2.08.2 .14.03.05.02	Melakukan Verifikasi ulang terkait kelayakan data seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Kepala Bidang Sosial	Laporan Verifikasi	Triwulan IV
10	Data masyarakat yang membutuhkan bantuan pengembangan ekonomi tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2 .14.03.05.03	Melakukan Verifikasi ulang terkait kelayakan usulan data Masyarakat yang membutuhkan bantuan Pengembangan Ekonomi	Kepala Bidang Sosial	Laporan Verifikasi	Triwulan III-IV
11	Paket permakanan yang di beli kedaluwarsa	ROO.1.06.2.08.2 .14.04.06.01	Memastikan bahwa barang yang kedaluwarsa bisa di kembalikan	Kepala Bidang Sosial	Berita Acara	Triwulan II-IV
12	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan sandang Kepada Korban Bencana	ROO.1.06.2.08.2 .14.04.06.02	Menggunakan kendaraan Umum dalam menyalurkan Bantuan Logistik kepada Korban Bencana	Kepala Bidang Sosial	Laporan Bantuan Sosial terhadap Korban Bencana	Triwulan II-IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
13	Dokumen Pelaporan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2 .14.06.09.03	Menyiapkan Format baku yang di gunakan untuk pelaporan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Format laporan	Triwulan II-IV
14	Adanya kerusakan pada barang Cetakan	ROO.1.06.2.08.2 .14.06.09.05	Memastikan bahwa barang yang rusak bisa di tukar	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Berita Acara	Triwulan II-IV
15	Permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.1.06.2.08.2 .14.06.11.01	Berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau terkait perhitungan permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Koordinasi	Triwulan II-IV
16	Kegagalan Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau bahkan bisa menimbulkan resiko kehamilan.	ROO.1.06.2.08.2 .14.06.11.04	Memberikan sosialisasi dan pemberian informasi terkait penggunaan kontrasepsi yang efektif kepada masyarakat	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Kegiatan	Triwulan II-IV
17	Adanya kerusakan pada BKB Kit Stunting	ROO.1.06.2.08.2 .14.07.13.02	Memastikan bahwa barang yang rusak bisa di tukar	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Berita Acara	Triwulan II-IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
18	Rendahnya Pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2 .14.08.14.03	Membuka warung PUG dan PPRG sebagai wadah untuk tempat berkonsultasi terkait pelaksanaan PUG	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Kegiatan	Triwulan II-IV
19	Ada kasus perempuan korban kekerasan yang tidak mendapat penanganan	ROO.1.06.2.08.2 .14.09.18.01	Melakukan sosialisasi dan Penjangkauan Kasus dengan turun langsung ke daerah-daerah yang tidak terjangkau informasi yang di berikan	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Laporan Hasil Kegiatan	Triwulan II-IV
20	Waktu pelayanan Pendampingan terhadap Perempuan korban kekerasan tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan	ROO.1.06.2.08.2 .14.09.18.02	Merujuk Klien untuk mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli keluar daerah	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Laporan Kasus	Triwulan II-IV
21	Pemilihan Tenaga Ahli yang penyusun Profil data Gendar dan Anak yang tidak tepat	ROO.1.06.2.08.2 .14.11.21.01	Penunjukan Langsung	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen Profil Data Gender dan Anak	Triwulan II-IV
22	Monev KLA yang belum Optimal	ROO.1.06.2.08.2 .14.12.22.01	Jemput bola dalam melakukan pembinaan untuk kelengkapan pemenuhan Dokumen pendukung KLA	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai KLA	Triwulan II-IV
23	Masih ada Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang belum mendapatkan Pelayanan	ROO.1.06.2.08.2 .14.13.24.01	Melakukan sosialisasi dan Penjangkauan Kasus dengan turun langsung ke daerah-daerah yang tidak terjangkau informasi yang di berikan	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Laporan Hasil Kegiatan	Triwulan II-IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
24	Waktu pelayanan Pendampingan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	ROO.1.06.2.08.2 .14.13.24.02	Merujuk Klien untuk mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli keluar daerah	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Laporan Kasus	Triwulan II-IV

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



Dra. KAMISAH, M.Pd.I
NIP. 19690219 199401 2 001

Selatpanjang, 24 Desember 2024

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial



NURHABIBUL SE

NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos

NIP. 19821212 201001 2 043

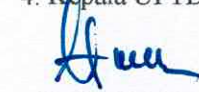
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NURHAYANTO, S.Pd.SD

NIP. 19680512 199303 1 010

4. Kepala UPTD PPA



MARTINI, SE

NIP. 19771104 200701 2 004